



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
SEKRETARIAT DPRD

Jln Jend Sudirman No. 324 Kec MaritengngaE Kode Pos 91611

Pangkajene Sidenreng, 30 Januari 2023

K e p a d a :

Nomor : 177/ /Set.DPRD/I/2023
Lamp. : 9 Rangkap
Perihal : **Penyampaian Propemperda
TA. 2022 dan Ranperda
yang sudah disahkan
menjadi Perda pada
Tahun 2022**

Yth. **Dewan Pengurus Nasional
Asosiasi Sekretaris DPRD
Kabupaten/Kota
Seluruh Indonesia**
Di-

T E M P A T

Menindaklanjuti Surat Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia nomor 066/A/DPN-ASDEKSI/II/2023 Tanggal 26 Januari 2023 Perihal pemberitahuan dalam rangka monitoring dan evaluasi serta akselerasi penetapan perencanaan produk hukum daerah sebagai tindaklanjut pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Maka dengan ini kami menyampaikan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Propemperda Nomor 9 Tahun 2021 tentang program Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 (**Daftar terlampir**)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

A. MUH. FAISAL, SH, M.Si
NIP. 19650809 199403 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
SEKRETARIAT DPRD

Jln Jend Sudirman No. 324 Kec MaritengngaE Kode Pos 91611

**DAFTAR RANPERDA YANG DITETAPKAN MENJADI PERDA KAB.
SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2022**

NO	JUDUL	TANGGAL PENETAPAN DALAM PARIPURNA	PEMRAKARSA
1	PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2021	18 JULI 2022	PEMDA
2	PENYELENGGARAAN KEARSIPAN	18 JULI 2022	DPRD
3	POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	18 JULI 2022	PEMDA
4	APBD PERUBAHAN TA 2022	30 SEPTEMBER 2022	PEMDA
5	PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	07 OKTOBER 2022	PEMDA
6	INOVASI DAERAH	07 OKTOBER 2022	DPRD
7	APBD TA 2023	30 NOVEMBER 2022	PEMDA
8	PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM	5 DESEMBER 2022	DPRD
9	PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN BERUSAHA	5 DESEMBER 2022	DPRD

**SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

A. MUH. FAISAL, SH, M.Si
NIP. 19650809 199403 1 006



PIMPINAN DPRD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 1 TAHUN 2022

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PROPEMPERDA NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG
PROPEMPERDA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 94 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang pada substansinya mengatur bahwa seluruh jenis Pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sidenreng Rappang tentang Perubahan atas Propemperda Nomor 9 Tahun 2021 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157) ;
5. Peraturan DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 01 DPRD Tahun 2019 tentang Tata Tertib.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan dokumen perencanaan tahunan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Tahun 2022;
- KETIGA : Dalam Melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah harus berdasarkan Propemperda sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU;
- KEEMPAT : biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun anggaran 2022;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SEKRETARIS DPRD	
KABAG PERSIDANGAN PERUNDANG-UNDANGAN	
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	
RISALAH LEGISLASI	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 31 Maret 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
WAKIL KETUA,


KASMAN

Tembusan : Kepada Yth,

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar.
3. Bupati Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng.
4. Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng.
5. Forkopimda Kab. Sidenreng Rappang Masing-masing di Tempat.
6. Para Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Masing-masing di Tempat.
7. Pertinggal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
 NOMOR : 1 TAHUN 2022
 TANGGAL : 31 MARET 2022

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT KERJA/INSTANSI TERKAIT	PEMRAKARSA	KET
				BARU	UBAH/ CABUT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	PERDA	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Pengembangan Dan Pengelolaan Irigasi Di Kabupaten Sidenreng Rappang	1. Ketentuan Umum 2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi 3. Kelembagaan Pengelola Irigasi 4. Wewenang Dan Tanggung Jawab 5. Partisipasi Masyarakat Petani 6. Pemberdayaan 7. Pengelolaan Air Irigasi 8. Pengembangan Jaringan Irigasi 9. Pengelolaan jaringan Irigasi		✓	○ Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber daya Air ○ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	➤ PSDA ➤ BAPPELITBANGDA ➤ BAGIAN HUKUM	PEMDA	

			10. Pengelolaan Aset Irigasi 11. Pembiayaan 12. Alih Fungsi Lahan Beririgasi 13. Koordinasi Pengelolaan Sistem Irigasi 14. Pengawasan 15. Ketentuan Penyidikan 16. Ketentuan Pidana 17. Ketentuan Peralihan 18. Ketentuan Penutup					
2.	PERDA	PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	1. Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah 2. Retribusi Pasar 3. Retribusi Persetujuan bangunan 4. Retribusi Pelayanan Tera-Tera Ulang 5. Retribusi Pengendalian Menanra Telekomunikasi 6. Retribusi Terminal 7. Retribusi Tempat Khusus Parkir 8. Retribusi Rumah Potong Hewan 9. Retribusi Pelayanan Kesehatan 10. Retribusi Tempat	✓		UU No.1 Tahun 2022 Pasal 94 tentang Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang pada substansinya mengatur bahwa seluruh jenis Pajak dan Retribusi daerah ditetapkan dalam satu perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi daerah	BAPENDA	PEMDA

			Penginapan/Pesanggrahan/Villa 11. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 12. Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan 13. Retribusi Pelayanan Pasar 14. Retribusi Terminal 15. Retribusi Izin Trayek 16. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum 17. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 18. Pajak Restoran 19. Pajak Hotel 20. Pajak Hiburan 21. Pajak Reklame 22. Pajak Penerangan jalan 23. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan						
3.	PERDA	Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah		✓		Lahirnya PP No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Permendagri No.77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Mengamanahkan Perubahan Perda	BKAD	PEMDA	

4.	PERDA	Perubahan atas Perda No.5 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten		✓	Lama	BAPPELITBANGDA	PEMDA	
5.	PERDA	Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD 2021	1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Arus Kas 4. Catatan atas laporan Keuangan	✓		BKAD	PEMDA	
6.	PERDA	APBD Perubahan TA 2022		✓	1. PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Permendagri No. 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Balanja Daerah Tahun Anggaran 2022	BKAD	PEMDA	
7.	PERDA	APBD Tahun 2023		✓	1. PP No. 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Permendagri No.77 Tahun 2020 tentang	BKAD	PEMDA	

8.	PERDA	Inovasi Daerah	1. Ketentuan Umum 2. Bentuk Inovasi Daerah 3. Kriteria Inovasi Daerah 4. Pemberi Usulan Inisiatif Inovasi Daerah 5. Mekanisme Pegusulan Inovasi Daerah 6. Penetapan Inovasi Daerah 7. Uji Coba Inovasi Daerah 8. Penerapan, Penilaian, dan Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah 9. Diseminasi Inovasi Daerah 10. Pendanaan 11. Informasi Inovasi Daerah 12. Pembinaan dan Pengawasan 13. Ketentuan Peralihan 14. Ketentuan Penutup	✓	Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ➤ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ➤ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem nasional Ilmu Pegetahuan dan Teknologi ➤ Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah	BAPEMPERDA	DPRD	
9.	PERDA	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha	1. Ketentuan Umum 2. Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 3. Pelaksanaan Perizinan Berusaha di Daerah 4. Perda dan Perkada Mengenai Perizinan Berusaha	✓	PP No.6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	BAPEMPERDA	DPRD	

			5. Pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Pembinaan dan Pengawasan 7. Pendanaan 8. Sanksi Administratif 9. Ketentuan Penutup						
10.	PERDA	Penyelenggaraan Kearsipan	1. Ketentuan Umum 2. Maksud, Tujuan, Asas dan Ruang Lingkup 3. Kewajiban dan Wewenang 4. Penyelenggaraan Kearsipan 5. Sistem Informasi Kearsipan Daerah dan Jaringan Informasi Kearsipan Daerah 6. Sumber Daya Manusia 7. Kerja Sama 8. Pembinaan dan Pengawasan 9. Peran Serta Masyarakat 10. Penghargaan 11. Pembiayaan 12. Larangan 13. Sanksi Administrasi 14. Ketentuan Penyidikan 15. Ketentuan Pidana 16. Ketentuan Penutup	✓		Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan	BAPEMPERDA	DPRD	

11.	PERDA	Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin	1. Ketentuan hukum 2. Asas dan Tujuan 3. Penyelenggaraan bantuan hukum 4. Hak dan kewajiban 5. Tata cara pemberian bantuan hukum 6. Larangan 7. Partisipasi masyarakat 8. Pembinaan dan pengawasan 9. Anggaran bantuan hukum 10. Sanksi administratif 11. Ketentuan penyidikan 12. Ketentuan pidana 13. Ketentuan penutup	✓	Uu no 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum	BAPEMPERDA	DPRD	
-----	-------	---	---	---	---	------------	------	--

SEKRETARIS DPRD	<i>[Signature]</i>
KABAG PERSIDANGAN PERUNDANG-UNDANGAN	<i>[Signature]</i>
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	<i>[Signature]</i>
RISALAH LEGISLASI	<i>[Signature]</i>
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	<i>[Signature]</i>

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
WAKIL KETUA,

[Signature]
KASMAN



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 10 TAHUN 2022**

T E N T A N G

PROPEMPERDA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah secara terencana, sistematis dan terpadu sesuai dengan amanah Undang-undang No 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka dipandang perlu menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Sidenreng Rappang tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Tahun 20122 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801) ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157) ;

5. Peraturan DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 01
DPRD Tahun 2019 tentang Tata Tertib.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

- KESATU** : Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Propemperda sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan dokumen perencanaan tahunan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Tahun 2023;
- KETIGA** : Dalam Melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah harus berdasarkan Propemperda sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU;
- KEEMPAT** : biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun anggaran 2023;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 22 November 2022

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

KETUA,


RUSLAN

Tembusan : Kepada Yth,

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar.
3. Bupati Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng.
4. Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng.
5. Forkopimda Kab. Sidenreng Rappang Masing-masing di Tempat.
6. Para Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Masing-masing di Tempat.
7. Pertinggal.

Lampiran Keputusan DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang
 Nomor : 10 Tahun 2022
 Tanggal : 22 November 2022
 Tentang : PROPEMPERDA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANA	UNIT KERJA/ INSTANSI TERKAIT	KET
				BARU	UBAH/ CABUT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	PERDA	Badan Usaha Milik Desa	1. Ketentuan Umum 2. Pendirian Bum Desa 3. Pengurusan dan Pengelolaan Bum Desa 4. Pembinaan dan Pengawasan 5. Pembiayaan 6. Ketentuan Peralihan 7. Ketentuan Penutup	Baru		1. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 2. Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa	• Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, dan Perlindungan Anak • Bag. Hukum Setda	INISIATIF DPRD
2.	PERDA	Pemberian Insentif dan pemberian Kemudahan investasi di daerah	1. Ketentuan Umum 2. Asas, tujuan dan sasaran 3. Kewenangan penanaman modal 4. Kebijakan penanaman modal daerah 5. Peran serta masyarakat 6. Insentif dan kemudahan penanaman modal 7. Sanksi administrasi 8. Ketentuan penutup	Baru		1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja 2. PP nomor 24 tahun 2019	• Dinas Perdagangan • Dinas Koperasi, UKM, Tenaga kerja dan Transmigrasi • Dinas Biciptapera • Bag. Hukum Setda • Bag. Ekonomi Setda • Bag. Kerjasama Setda	• INISIATIF DPRD • TURUNAN UU CIPTAKERJA

3.	PERDA	Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	1. Ketentuan Umum 2. Ragam penyandang disabilitas 3. Hak dan Kewajiban penyandang disabilitas 4. Perencanaan 5. Pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas 6. Peran serta masyarakat 7. Koordinasi 8. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi 9. Penghargaan 10. Pendanaan 11. Larangan 12. Ketentuan penyidikan 13. Ketentuan pidana 14. Ketentuan penutup	Baru		1. Undang-undang nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas • Dinas Sosial • Bag. Hukum Setda	INISIATIF DPRD
4.	PERDA	Rencana pengelolaan dan Pemantauan lingkungan hidup (RPPLH)	1. Tinjau kebijakan 2. Gambaran umum wilayah 3. Kajian teori dan regulasi 4. Ketentuan dan penutup	Baru	UU No 5 Tahun 2014	• Dinas Lingkungan Hidup • Bag. Hukum Setda	• INISIATIF DPRD • TURUNAN UU CIPTAKERJA

5.	PERDA	Rencana Tata Ruang Wilayah	1. Ketentuan Umum 2. Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang 3. Rencana struktur ruang 4. Rencana pola ruang 5. Penetapan kawasan strategis 6. Arahana pemanfaatan ruang wilayah 7. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang 8. Hak, kewajiban dan peran masyarakat dalam penataan ruang 9. Penyidikan 10. Sanksi 11. Kelembagaan 12. Ketentuan lain-lain 13. Ketentuan peralihan 14. Ketentuan penutup	Baru	Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	• Dinas Binamarga, Cipta karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat • Bappelitbangda • Bag. Hukum Setda	PRAKARSA PEMDA
6.	PERDA	Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan	1. Ketentuan Umum 2. Penyelenggaraan 3. Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kota 4. Penyediaan perlengkapan jalan umum yang berstatus sebagai jalan kota 5. Pengelolaan terminal penumpang 6. Penertiban izin	Baru	• Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan	• Dinas Perhubungan • Bapelitbangda • Bagian Hukum Setda	PRAKARSA PEMDA

			penyelenggaraan perparkiran 7. Pengujian berkala kendaraan bermotor 8. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kota 9. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kota 10. Sanksi administratif 11. Ketentuan pidana 12. Ketentuan penutup					
7.	PERDA	Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD 2022	1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Arus Kas 4. Catatan atas Laporan Keuangan	Baru		1. PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	•BKAD •Bag. Hukum Setda	PRAKARSA PEMDA
8.	PERDA	APBD Perubahan TA 2023		Baru		1. PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Permendagri No.27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	•BKAD •Bag. Hukum Setda	PRAKARSA PEMDA
9.	PERDA	APBD TAHUN 2024		Baru		1. PP No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman	•BKAD •Bag. Hukum Setda	PRAKARSA PEMDA

						Pengelolaan Keuangan Daerah		
10.	PERDA	Perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) tirta Nene Mallomo Kab. Sidenreng Rappang menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda Air Minum) Kabupaten Sidenreng Rappang	1. Ketentuan Umum 2. Pembentukan nama dan tempat 3. Maksud dan tujuan 4. Modal dan saham 5. Rapat pemegang saham 6. Pengurus 7. Direktur 8. Ketentuan tarif 9. Tahun buku, pelaporan keuangan dan tahunan serta anggaran PDAM 10. Penetapan penggunaan laba serta pemberian produksi 11. Pegawai 12. Dana pensiun 13. Tanggung jawab dan tuntutan rugi pegawai 14. Pembinaan dan pengawasan 15. pembubaran	Baru		1. PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah 2. Permendagri No. 37 tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan pengawas atau anggota komisaris dan anggota direksi badan usaha milik daerah 3. Permendagri No. 118 tahun 2018 tentang rencana kerja dan anggaran, kerjasama, pelaporan, dan evaluasi badan usaha milik daerah	• Bag. Ekonomi • Bag. Hukum • Bag. Setda • Bag. Setda	PRAKARSA PEMDA
11.	PERDA	Perubahan Peraturan Daerah kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal		Ubah			• Bag. Ekonomi • Bag. Hukum • Bag. Setda • Bag. Setda	PRAKARSA PEMDA

12.	PERDA	Daerah Pada Pihak Ketiga Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang No 15 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kab. Sidenreng Rappang	Pemisahan Bidang KB pada Dinas Kesehatan dan Bidang PPA pada Dinas Pemdes PPA dibentuk menjadi Badan KB dan PPA	Ubah		• Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB • Bag. Organisasi Setda	PRAKARSA PEMDA
-----	-------	--	---	------	--	---	----------------

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KETUA,

RUSLAN

PROPEMPERDA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2024

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANA	UNIT KERJA/ INSTANSI TERKAIT	KET
				BARU	UBAH/ CABUT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	PERDA	Badan Usaha Milik Desa	1. Ketentuan Umum 2. Pendirian Bum Desa 3. Pengurusan dan Pengelolaan Bum Desa 4. Pembinaan dan Pengawasan 5. Pembiayaan 6. Ketentuan Peralihan 7. Ketentuan Penutup	Baru		1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 2. Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa	• Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, dan Perlindungan Anak • Bag. Hukum Setda	INISIATIF DPRD
2.	PERDA	Pemberian Insentif dan pemberian Kemudahan investasi di daerah	1. Ketentuan Umum 2. Asas, tujuan dan sasaran 3. Kewenangan penanaman modal 4. Kebijakan penanaman modal daerah 5. Peran serta masyarakat 6. Insentif dan kemudahan penanaman modal 7. Sanksi administrasi 8. Ketentuan penutup	Baru		1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja 2. PP nomor 24 Tahun 2019	• Dinas Penanaman Modal PTSP • Dinas Perdagangan dan Perindustrian • Dinas Koperasi, UKM, Tenaga kerja dan Transmigrasi • Dinas Biciptapera • Dinas Kesehatan • Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan ketahanan	• INISIATIF DPRD • TURUNAN UU CIPTAKERJA

							pangan •Bag. Hukum Setda •Bag. Ekonomi Setda •Bag. Kerjasama Setda	
3.	PERDA	Perubahan atas Perda No 2 Tahun 2014 tentang PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA	1. Ketentuan Umum 2. Asas Dan Tujuan 3. Ruang Lingkup 4. Tugas Dan Wewenang Pemda 5. Antisipasi Dini 6. Pencegahan 7. Penanggulangan 8. Peran Serta Masyarakat 9. Pembinaan Dan Pengawasan 10. Upaya Khusus 11. Forum Koordinasi 12. Penghargaan 13. Pembiayaan 14. Sanksi Administratif 15. Ketentuan Penutup		Ubah			INISIATIF DPRD
4.	PERDA	Perubahan atas Perda No. 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah	1. Ketentuan Umum 2. Asas, Tujuan dan Ruang lingkup 3. Tugas dan wewenang 4. Hak dan kewajiban 5. Pengelolaan Sampah 6. Perizinan 7. Lembaga Pengelola 8. Pembiayaan dan Kompensasi 9. Insentif dan		Ubah		•Dinas Lingkungan Hidup •Bag. Hukum Setda	INISIATIF DPRD

			Disinsentif 10. Kerjasama dan kemitraan 11. Retribusi pelayanan persampahan 12. Peran masyarakat 13. Pembinaan dan pengawasan 14. Larangan dan sanksi administratif 15. Ketentuan penyidikan 16. Ketentuan pidana 17. Ketentuan penutup					
5.	PERDA	Perubahan atas Perda No. 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten			Ubah		• Dinas Binamarga, Cipta karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat • Bappelitbangda • Bag. Hukum Setda	PRAKARSA PEMDA
6.	PERDA	Perubahan atas Perda No. 28 Tahun 2007 tentang pengelolaan Irigasi di Kabupaten Sidenreng Rappang	1. Ketentuan Umum 2. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi 3. Kelembagaan pengelola irigasi 4. Wewenang dan tanggungjawab 5. Partisipasi masyarakat petani 6. Pemberdayaan 7. Pengelolaan air irigasi		Ubah		• Dinas Perhubungan • Bapelitbangda • Bagian Hukum Setda	PRAKARSA PEMDA

			8. Pengembangan jaringan irigasi 9. Pengelolaan aset irigasi 10. Pembiayaan 11. Alih fungsi lahan beririgasi 12. Koordinasi pengelolaan sistem irigasi 13. Pengawasan 14. Ketentuan penyidik 15. Ketentuan pidana 16. Ketentuan peralihan 17. Ketentuan penutup					
7.	PERDA	Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD 2023	1. Ketentuan Umum 2. Realisasi Laporan Anggaran 3. Laporan Realisasi Anggaran/LRA 4. Neraca 5. Laporan Operasional 6. LaporanArus Kas 7. Laporan Perubahan SAL 8. Laporan Perubahan Ekuitas 9. Ketentuan Penutup	Baru				PRAKARSA PEMDA
8.	PERDA	APBD Perubahan TA 2024		Baru			•BKAD •Bag. Hukum Setda	PRAKARSA PEMDA
9.	PERDA	APBD TAHUN 2025		Baru			•BKAD •Bag. Hukum Setda	PRAKARSA PEMDA